



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PEMBUKAAN MASA PERSIDANGAN IV  
TAHUN SIDANG 2022-2023**

**SELASA, 14 MARET 2023**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,  
Salam Sejahtera bagi kita semua,  
Om Swasti Astu,  
Namo Buddhaya,  
Salam Kebajikan,*

**Yang kami hormati:**

- **Para Wakil Ketua DPR;**
- **Para Anggota DPR;**
- **Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023.

Selamat datang bagi seluruh Anggota DPR RI yang baru saja kembali dari kegiatan bersama konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.

**Sidang Dewan yang Terhormat,**

Memasuki Masa Persidangan IV ini, berbagai dinamika dan permasalahan dalam penyelenggaraan negara mengemuka dan menjadi perhatian rakyat;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk Menunda Pemilu, telah menimbulkan perdebatan konstitusional dan membutuhkan penyikapan politik hukum agar konstitusi UUD NRI 1945 tetap dipatuhi; hal lain yang menjadi perhatian rakyat adalah berbagai kasus yang mengemuka dari oknum pejabat Aparatur Sipil Negara yang diduga memiliki kekayaan yang tidak sesuai dengan profil jabatannya.

Konstitusi UUD NRI 1945 pada Pasal 22E mengamanatkan secara tegas bahwa pemilu harus dilakukan 5 tahun sekali. Oleh karena itu diperlukan politik hukum yang sungguh-sungguh dalam menyikapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunda Pemilihan Umum. Tentu langkah KPU untuk mengajukan banding, merupakan upaya untuk mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. DPR RI akan memberikan perhatian yang serius pada penuntasan kepastian hukum permasalahan ini agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Saat ini, dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi, Rakyat dapat selalu melihat dan memantau segala bentuk kegiatan pejabat negara; baik kegiatan dalam menjalankan tugas maupun kegiatan di luar tugas; bahkan rakyat melalui pemantauan di media sosial juga mengamati ruang kehidupan pribadi dan keluarga.

Pejabat negara selalu dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi, yang diperlihatkan dengan ketaatan pada aturan, bermartabat, menjalankan prinsip-prinsip kejujuran, transparan, dan tanggung jawab. Mengemukanya kasus oknum di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki kekayaan tidak sesuai dengan profil jabatannya merupakan indikasi adanya oknum-oknum yang tidak berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

Dengan mengemukanya kasus ini, dapat menjadi momentum bagi seluruh aparatur negara, di seluruh kementerian/lembaga, untuk dapat memperkuat praktek

integritas, yang diwujudkan mulai dari kedisiplinan individu-individu, bisnis proses, dan peringatan dini.

DPR RI juga ikut memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga integritas, kehormatan dan kedudukan sebagai anggota DPR RI dalam menjalankan kedaulatan rakyat.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Dalam pembahasan Rancangan Undang Undang, DPR RI bersama dengan Pemerintah akan melanjutkan pembahasan terhadap 20 (*dua puluh*) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih dalam pembahasan Tingkat I, serta Rancangan Undang-Undang (RUU) lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2023.

Dalam masa persidangan ini DPR RI juga akan melakukan pembahasan terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, guna memberikan kepastian hukum, terutama untuk penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di sejumlah daerah pemekaran di Papua.

Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan menjadi perhatian DPR RI dengan ikut mempertimbangkan berbagai aspirasi dari masyarakat serta memperhatikan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini.

Harapan rakyat kepada DPR RI adalah menghasilkan Undang Undang yang dapat mempercepat kemajuan bangsa dan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dalam pembentukan Undang Undang, DPR RI bersama Pemerintah, akan selalu mempertimbangkan substansi Undang Undang dari berbagai prespektif kepentingan dan khususnya berpihak pada kepentingan bangsa dan negara.

## **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Terkait pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, kinerja APBN pada bulan Januari 2023 berada dalam jalur yang kondusif, yaitu didukung kinerja pendapatan dan belanja yang terjaga baik di tengah perekonomian global yang masih dibayangi berbagai risiko dan gejolak.

Pada masa persidangan ini, DPR RI melalui AKD akan terus melakukan fungsi pengawasan APBN agar benar-benar efektif untuk menciptakan kemajuan di berbagai bidang dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Fungsi Pengawasan DPR RI pada pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2023, akan diarahkan pada pengawasan, evaluasi, dan penajaman dalam mencapai target-target pembangunan, di berbagai bidang, yang telah direncanakan oleh Pemerintah.

Terhadap kebijakan fiskal yang baru ataupun perubahannya, yang berimplikasi pada alokasi anggaran pada program kegiatan tertentu dalam APBN, maka pemerintah harus mengikuti mekanisme Undang Undang APBN dalam melakukan perubahan-perubahan kebijakan fiskal tersebut.

### **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang akan menjadi perhatian Alat Kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain:

1. Kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di berbagai daerah;
2. Maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak;
3. Permasalahan finalisasi penataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau tenaga honorer;



4. Pengawasan keamanan pangan yang belum terpadu;
5. Kenaikan harga beras dan pangan menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri;
6. Kenaikan harga BBM nonsubsidi di beberapa wilayah di Indonesia;
7. Pembiayaan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN);
8. Percepatan perizinan kegiatan besar melalui digitalisasi;
9. Peristiwa Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang;
10. Polemik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai Penundaan Pemilu Tahun 2024; dan
11. Peningkatan partisipasi pemilihan umum (pemilu) 2024 dari kaum difabel dan anak muda milenial;
12. Permasalahan kekayaan oknum pejabat ASN di Kemenkeu yang tidak sesuai profil jabatannya.

Selain itu pada bidang pengawasan, DPR RI juga akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap pejabat publik dan non pejabat publik yang akan dilakukan pada masa persidangan ini.

## **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Dalam kegiatan diplomasi parlemen, DPR RI akan mengagendakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antarpallemen. DPR RI akan menerima kunjungan delegasi dari beberapa negara, antara lain Denmark, Polandia, Romania, dan Malaysia.

Selain hubungan kerja sama bilateral, beberapa sidang juga akan dihadiri oleh delegasi Indonesia sebagai perwujudan diplomasi yang turut mendukung tercapainya tatanan global yang lebih baik dan adil.

Salah satunya adalah terpilihnya parlemen Indonesia sebagai ketua parlemen forum konsultatif antar-lima negara, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia (MIKTA) pada 9 Maret 2023. Keketuaan Indonesia yang telah diterima dari Parlemen Turki ini akan dijalani selama satu tahun hingga 24 Maret

2024. Parlemen Indonesia optimistik akan dapat meneruskan kesuksesan yang telah dicapai melalui tiga area yang akan menjadi prioritas kerja, yaitu memperkuat multilateralisme, pemulihan inklusif, dan transformasi digital dalam menghadapi tantangan dan peluang di abad ke-21.

Selain itu, dukungan terhadap presidensi Indonesia di ASEAN dan AIPA juga telah diberikan oleh delegasi-delegasi luar negeri sebagai komitmen atas sikap proaktif yang dilakukan.

Serangkaian kegiatan diplomasi yang akan dilakukan tersebut tentunya akan berguna untuk meningkatkan kerja sama antarnegara dan memperkuat politik luar negeri Indonesia.

Dalam mengupayakan tatanan global, Indonesia akan terus mendorong kerja sama demi terwujudnya perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih baik.

## **Sidang Dewan yang Terhormat,**

Demikian pokok-pokok kegiatan yang akan dilakukan DPR RI pada Masa Persidangan IV dan berbagai hal yang menjadi perhatian DPR RI.

Rencana kerja DPR RI yang telah disampaikan ini, agar dapat menjadi informasi bagi rakyat Indonesia, untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan tugas-tugas DPR RI.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, saya atas nama Pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022–2023 akan dimulai sejak hari ini, Selasa 14 Maret 2023 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini.

Atas nama Pimpinan DPR RI, kami menyampaikan  
"SELAMAT BEKERJA MENJALANKAN KEDAULATAN  
RAKYAT"

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan rahmat dan bimbingan-Nya bagi kita semua.

**Terima kasih.**

***Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.***

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,**

**Ttd.**

**Dr. (H.C.) PUAN MAHARANI**

## **LAMPIRAN:**

### **➤ Daftar RUU yang masih berada dalam Proses Pembahasan Tingkat I:**

1. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. RUU tentang Hukum Acara Perdata;
4. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
6. RUU tentang Provinsi Sumatera Utara;
7. RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan;
8. RUU tentang Provinsi Jawa Barat;
9. RUU tentang Provinsi Jawa Tengah;

10. RUU tentang Provinsi Jawa Timur;
11. RUU tentang Provinsi Maluku;
12. RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah;
13. RUU tentang Provinsi Bali.
14. RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan;
15. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak;
16. RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
17. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
18. RUU tentang Landas Kontinen;
19. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; dan
20. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.